

## PEMBERDAYAAN POSISI DAN PERAN TOKOH TRADISIONAL DALAM UPAYA PENGEMBANGAN TERNAK DI PROVINSI BANTEN

KEDI SURADISASTRA<sup>1</sup> dan D. PRIYANTO<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jl. A. Yani No. 70, Bogor*

<sup>2</sup>*Balai Penelitian Ternak, PO Box 221, Bogor 16002*

(Makalah diterima 21 Desember 2010 – Revisi 9 Juni 2011)

### ABSTRAK

Upaya pengembangan ternak melalui program kampung ternak adalah model yang tepat dalam upaya meningkatkan produksi daging untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Pengembangan kampung ternak dalam bentuk Kampung Domba di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, juga berfungsi sebagai kawasan penyangga hutan dan lingkungan. Tujuan pembangunan kampung ternak juga didasari target kontribusi pendapatan peternak sebesar 50% dari upah minimum regional (UMR) Provinsi Banten. Keberhasilan program kampung ternak sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor sosial-budaya sebagai berikut: (a) kultur dasar masyarakat Banten; (b) kepemimpinan lokal; dan (c) pola dan proses pengambilan keputusan. Untuk penerapan pengembangan kampung ternak tersebut sangat ditentukan oleh peran tokoh tradisional di suatu kawasan tertentu. Tokoh lokal dapat mempercepat keberhasilan pengembangan kampung ternak secara berkelanjutan. Peran tokoh yang disegani oleh masyarakat merupakan celah masuk (*entry point*) yang perlu diperhatikan dalam mendukung penerimaan program kampung ternak.

**Kata kunci:** Kampung ternak, kelembagaan lokal

### ABSTRACT

#### EMPOWERMENT OF POSITION AND ROLES OF TRADITIONAL LEADERS IN THE DEVELOPMENT OF LIVESTOCK HAMLET IN THE BANTEN PROVINCE

Developing livestock village is a suitable effort to enhance meat production for fulfilling increasing of the product demand. Developing livestock village in form of Sheep Hamlet in the Regency of Pandeglang, Province of Banten, is also function as forest and environmental buffer zone. Another target of such a livestock development center is to improve farmer's income by at least 50% of Banten's Minimum Regional Wage. The success of Sheep Hamlet so far depends upon the following socio-cultural factors: (a) the basic culture of the Bantams, (b) local leadership, and (c) decision making pattern and process. The development of livestock hamlet depends on the roles of local informal figure in the respective area. Such a local leader can help accelerating the success of a livestock development in a sustainable fashion. The existence of a respected local figure is a crucial entry point in the process of livestock hamlet development in the such area.

**Key words:** Livestock hamlet, local institution

### PENDAHULUAN

Provinsi Banten didirikan pada tahun 2000 melalui UU no. 23/2000. Banten terdiri atas 4 kabupaten, yaitu Tangerang, Serang, Pandeglang dan Lebak, serta 3 kota (Serang, Cilegon dan Tangerang). Populasi Provinsi Banten pada tahun 2006 tercatat sebesar 9,31 juta orang (SURADISASTRA *et al.*, 2009). Sektor pertanian masih merupakan kegiatan utama bagi masyarakat pedesaan. Sebanyak 36% penduduk pedesaan dalam usia kerja melaksanakan kegiatan di sektor pertanian. Sebesar 25% penduduk bekerja di sektor industri pertanian, 21% di sektor perdagangan dan 12% di sektor jasa dan pelayanan. Sisanya terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan pertambangan, kelistrikan, distribusi air dan gas. Kegiatan di sektor

pertanian sangat menonjol di Kabupaten Lebak dan Pandeglang dimana sekitar 61% penduduk Kabupaten Lebak dan 55% penduduk Kabupaten Pandeglang bekerja di sektor pertanian. Provinsi Banten adalah provinsi yang berumur relatif muda dan merupakan wilayah administratif yang berlokasi di sebelah barat Provinsi Jawa Barat. Dalam dua dekade terakhir wilayah Banten, sejak sebelum menjadi provinsi, telah dikembangkan ke arah industri. Kota dan Kabupaten Tangerang dan Cilegon kini merupakan wilayah pengembangan berbagai industri. Akan tetapi sektor pertanian masih merupakan kegiatan utama sebagian besar masyarakat Banten. Usahatani tanaman pangan, terutama padi, merupakan kegiatan utama dalam sektor pertanian.

Pembangunan ekonomi berbasis subsektor peternakan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan handal, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, yang terfokus pada usahaternak kecil/tradisional dalam meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Komoditas ternak domba adalah menduduki proporsi tertinggi di wilayah yang mencapai 15.276 ekor, dan disusul ternak kerbau yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam upaya peningkatan pendapatan petani (DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN, 2008). Salah satu langkah yang ditempuh adalah membuka pelayanan dan kesempatan seluas-luasnya untuk membuka usaha atau investasi di bidang peternakan, mulai dari sektor hulu hingga hilir. Upaya pengembangan spesifik lokasi/wilayah adalah yang paling tepat dengan konsep "Kampung Ternak" sehingga mampu berperan sebagai percontohan pengembangan berbasis peternakan dalam meningkatkan pendapatan berkelanjutan.

Model kampung ternak dibentuk ke arah pengembangan pembibitan pedesaan (*Village Breeding Centre*) yang berorientasi usaha agribisnis, dan dalam jangka panjang lokasi tersebut dapat terbentuk sebagai wilayah sumber bibit, sebagai pemasok bibit bagi wilayah lainnya. Untuk mencapai kondisi tersebut perlu dikaji tentang potensi sumberdaya (lahan, ternak, dan manusia), serta prospek pengembangan dalam jangka panjang yang berkelanjutan dengan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) (CHAMBERS, 1993) dan analisis agro-ekosistem (CONWAY, 1986). Sebagai dicontohkan kampung ternak domba (di Kabupaten Pandeglang) diarahkan pada pola integrasi dengan tanaman pangan, sekaligus dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan dalam upaya penciptaan sumber ekonomi agar tidak merusak kawasan hutan lindung dengan penebangan kayu ilegal untuk kayu bakar yang disebut sebagai *Buffer Zone Management System* (PRIYANTO *et al.*, 2009). Di dalam perombakan pola pikir mengarah pada usaha agribisnis, selain dilakukan inovasi teknologi juga perlu mengikut

sertakan tokoh masyarakat (pimpinan lokal) sebagai pemimpin informal yang disegani oleh masyarakat sebagai celah masuk (*entry point*) dalam mempengaruhi petani untuk menerapkan teknologi dalam pemberdayaan pembentukan kampung ternak.

## SUBSEKTOR PETERNAKAN

### Potensi dan perkembangan subsektor peternakan

Ternak ruminansia yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Banten antara lain adalah kerbau dan domba. Tingkat kepemilikan kerbau pernah dijadikan penentu status sosial-ekonomi masyarakat. Wilayah Banten Selatan yang berbukit (jalur Cilegon, Anyer, Pandeglang) merupakan wilayah ideal sebagai padang penggembalaan kerbau beberapa dekade yang lalu. Sistem pemeliharaan yang dilepas menyebabkan kerbau-kerbau berkembang biak tanpa pengawasan serta bersifat liar. Waktu itu ukuran kekayaan ditunjukkan dengan jumlah bukit atau wilayah yang dihuni sekelompok besar kerbau milik seseorang. Pameo "haji Anu memiliki kerbau sebanyak tiga pasir (bukit)" menunjukkan kepemilikan kerbau dalam jumlah tidak terhitung (atau sulit dihitung) karena berkeliaran di kawasan tiga bukit tersebut. Semakin banyak jumlah bukit yang diklaim sebagai lahan penggembalaan kerbau, semakin besar kepemilikan kerbau mereka.

Populasi ternak kerbau yang relatif stabil terdapat di Kabupaten Pandeglang dan Lebak (Tabel 1). Hal ini terjadi karena konsumsi daging kerbau di kedua kabupaten tersebut tidak sebesar permintaan di kota dan kabupaten lainnya serta ketersediaan lahan sumber pakan ternak yang masih luas. Masyarakat Banten lebih banyak mengkonsumsi daging kerbau daripada daging sapi, terutama di daerah Banten bagian selatan dan Serang. Upaya dalam meningkatkan produktivitas ternak kerbau masih terhambat keterampilan dan pengetahuan teknis peternak pemelihara kerbau sehingga kenaikan konsumsi belum dapat dikejar dengan meningkatnya populasi.

**Tabel 1.** Sebaran populasi kerbau dan domba di Provinsi Banten

Kabupaten/kota	Kerbau		Domba	
	2005	2006	2005	2006
Kabupaten Serang	27.727	26.996	120.876	133.896
Kabupaten Tangerang	12.671	17.507	79.060	126.988
Kota Tangerang	37	14	1.200	1.132
Kota Cilegon	569	594	2.400	4.107
Kabupaten Pandeglang	41.992	42.632	140.335	150.785
Kabupaten Lebak	52.028	53.457	153.234	164.226
Total	135.024	141.200	497.105	581.134

**Sumber:** DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN (2008)

Populasi ternak domba cenderung mengalami peningkatan yang cukup tinggi (15,9 persen) yang merupakan ternak unggulan setelah kerbau. Potensi tersebut sangat cocok bagi petani kecil, yang merupakan pola usaha sambilan disamping usaha pokok pertanian. Perkembangan diarahkan pada usaha kecil (petani berpendapatan rendah) karena dalam sistem usaha tidak membutuhkan modal besar, disamping sistem usaha sangat tergantung pada sumberdaya lokal (pakan tersedia) yang murah dan efisien. Program pengembangan ternak domba merupakan rekomendasi yang tepat untuk menciptakan sumber pendapatan petani yang terintegrasi dengan tanaman pangan yang saling mendukung (DIWYANTO dan HANDIWIRAWAN, 2004).

### Kebijakan pembangunan peternakan

Kebijakan pembangunan subsektor peternakan Provinsi Banten mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2007 terkait sektor pertanian tentang pengembangan ekonomi lokal berbasis pertanian (tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, kelautan, kebudayaan, dan pariwisata), dan pengembangan kapasitas kelembagaan sosial-ekonomi berbasis masyarakat. Subsektor peternakan merupakan salah satu bidang yang direkomendasikan untuk dikembangkan sebagai bagian kebijakan pembangunan Provinsi Banten (DOKUMEN RPJM PROVINSI BANTEN, 2007).

Rekomendasi Pengembangan Sektor Pertanian dalam DOKUMEN RPJMN PROVINSI BANTEN (2008) sebagai berikut:

1. Penerapan teknologi pertanian, penyuluh pertanian, peningkatan akses petani terhadap modal dan perluasan lahan pertanian (ekstensifikasi).
2. Pengembangan agribisnis berorientasi pada peningkatan nilai tambah.
3. Pengembangan produk unggulan.
4. Perbaikan kelembagaan dan sistem tataniaga, serta peningkatan sarana dan prasarana sebagai jalan usahatani (*farm road*).
5. Pengembangan investasi swasta di bidang perkebunan serta peningkatan produktivitas dan produksi perkebunan rakyat serta didukung dengan perbaikan kelembagaan dan tataniaga.
6. Pengembangan dan peningkatan produksi ternak.

Rekomendasi pengembangan dan peningkatan produksi ternak dalam dokumen RPJMN tersebut disusun berdasarkan potensi riil subsektor peternakan di Provinsi Banten. Walaupun sebaran ternak di keempat kabupaten Provinsi Banten tidak merata dan populasi kerbau terkonsentrasi di Kabupaten Pandeglang dan Lebak demikian pula ternak domba,

namun kondisi ini secara eksplisit menunjukkan potensi pengembangan yang tinggi untuk meningkatkan produksi daging di provinsi tersebut. Sebagai contoh, produksi daging domba, kambing dan kerbau di Kabupaten Pandeglang terus meningkat dari tahun ke tahun (Tabel 2). Hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi daging di Kabupaten Pandeglang semakin meningkat. Hal lain yang mendorong peningkatan produksi adalah permintaan pasar dari luar Kabupaten Pandeglang.

Trend kenaikan produksi daging ini merupakan salah satu pendorong pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang untuk mengembangkan gagasan konsentrasi ternak penghasil daging dalam suatu kawasan yang terkontrol dan terjaga dengan baik serta memperhitungkan aspek-aspek teknis dan ekonomi secara berimbang. Gagasan kampung ternak didukung oleh lembaga penelitian (Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan) di Bogor untuk lebih diarahkan melalui pembinaan yang dilakukan oleh pakar-pakar peternakan. Kebijakan pengembangan dan peningkatan produksi ternak telah diimplementasikan berupa kegiatan pengembangan ternak domba di Kabupaten Pandeglang sebagai program unggulan yang akan terus dioptimalkan. Khusus untuk ternak domba di antaranya melalui sistem integrasi dengan ubi jalar yang dipusatkan di Kecamatan Menes dengan populasi saat ini lebih dari 5.000 ekor. Selain kegiatan integrasi ubi jalar dengan ternak domba di Kecamatan Menes, tahun 2009 di Kelurahan Juhut telah dikembangkan Kampung Domba dengan populasi awal sekitar 300 ekor (DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PANDEGLANG, 2009).

**Tabel 2.** Produksi daging Kabupaten Pandeglang (ton)

Komoditas	2005	2006	2007	2008
Domba	899	923	927	956
Kambing	667	676	681	735
Kerbau	576	604	627	668
Sapi	80	81	87	88

**Sumber:** DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PANDEGLANG (2009)

### Kebijakan pembangunan peternakan dan implementasinya

Khususnya gagasan pembentukan Kampung Domba dikembangkan berdasar pertimbangan kondisi dan potensi ekosistem Kabupaten Pandeglang yang sesuai untuk pengembangan ternak ruminansia. Selain itu lokasi Kabupaten Pandeglang juga tidak terlalu jauh dari ibukota Jakarta yang merupakan salah satu pusat konsumen utama produk peternakan. Pemekaran Kabupaten Pandeglang pada bulan Juli tahun 2007

menjadi 35 kecamatan dan 335 desa/kelurahan memberikan dampak terhadap pembangunan wilayah Kabupaten Pandeglang. Pemekaran wilayah lebih memudahkan Pemda Kabupaten Pandeglang dalam menyusun rencana pembangunan terkait upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, upaya membangun Kampung Domba atau kampung ternak lainnya sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pertanian Provinsi Banten dan selaras pula dengan rekomendasi Evaluasi Pelaksanaan RPJMN tahun 2008 (DOKUMEN RPJM PROVINSI BANTEN, 2008). Dari sisi teknis peternakan, ternak ruminansia kecil, khususnya domba, memiliki kemampuan produksi dan reproduksi tinggi, tidak membutuhkan keterampilan tinggi, dan dapat dipelihara dalam jumlah kecil sebagai kegiatan sampingan usahatani. Kondisi demikian menunjukkan bahwa ternak domba memiliki posisi *supplementary* dalam sistem usahatani di Provinsi Banten.

Kampung Domba dibentuk sebagai model percontohan pengembangan ternak di Kabupaten Pandeglang. Petani peserta kegiatan usahatani Kampung Domba diseleksi menurut bakuan usaha agribisnis yang disesuaikan dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan petani. Pola dan teknik pemeliharaan intensif (*cut-and-carry*) diterapkan. Dalam beberapa kondisi diterapkan pula teknik penggembalaan guna memberikan kesempatan untuk pemeriksaan kondisi kesehatan dan tanda-tanda birahi ternak betina. Tujuan jangka panjang Kampung Domba adalah memasok bibit ternak berkualitas guna meningkatkan mutu ternak domba di kabupaten lain di Banten. Dalam proses perencanaan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pandeglang bekerjasama dengan Balai Penelitian Ternak, Ciawi melakukan uji kelayakan usaha dari sisi teknis dan ekonomi. Lokasi Juhut dipilih karena lokasi ini merupakan salah satu sentra usahatani hortikultura kentang, sayur-sayuran wortel dan sayuran lain (PRIYANTO *et al.*, 2009). Secara teknis, pola Kampung Domba adalah pola usahatani-sayuran terintegrasi. Secara sosial, Kampung Domba merupakan salah satu strategi terapan pemberdayaan masyarakat setempat. Dari aspek pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, pengembangan dan posisi Kampung Domba dapat disejajarkan dengan konsep kawasan penyangga hutan dan lingkungan (*forest and environment bufferzone area*). Keberadaan zona penyangga yang berorientasi ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat diharapkan menjadi benteng pencegah masyarakat untuk memasuki kawasan hutan lindung dan merusak hutan dengan menebang kayu dan mengambil hasil hutan lainnya tanpa terkontrol.

Rancangan usahatani di Kampung Domba dipertimbangkan secara teknis dan ekonomi. Kegiatan pemeliharaan domba di sentra ternak ini diarahkan dan

diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan bulanan bagi petani dan mampu mencapai komposisi 50 persen dari Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Banten yakni sebesar Rp. 917.500 (PEMDA PROV. BANTEN, 2009). Dasar perhitungan teknis untuk menentukan besaran ekonomi usahatani domba adalah Laju Reproduksi Induk (LRI). LRI adalah jumlah anak yang hidup sampai disapih per induk per tahun. LRI adalah gambaran kemampuan induk merawat anaknya sampai usia sapih. Semakin besar nilai LRI, semakin tinggi kinerja produksi usahatani domba dan semakin besar tingkat keuntungannya. Jumlah dan komposisi ternak yang dipelihara oleh setiap peserta Kampung Domba dirancang untuk memenuhi nilai laju reproduksi induk (LRI) antara 2,33 ekor dan 2,63 ekor di Desa Nagrak dan Cisaat Kabupaten Sukabumi (SUBANDRIYO *et al.*, 1994). Kondisi ini dapat dicapai bila setiap peternak peserta memelihara 6 ekor induk domba dan 1 pejantan dengan selang perkawinan setiap 1 bulan sehingga diharapkan terjadi kelahiran setiap bulan. Paket pemeliharaan sebanyak 6 ekor induk memungkinkan perkawinan dilakukan setiap 2 minggu sehingga setiap peternak harus merancang kandang yang memiliki kapasitas tampung 15 ekor, yang cukup sesuai dengan alokasi tenaga kerja dan ketersediaan hijauan pakan. Kondisi nilai LRI 2,33 ekor per induk per tahun memungkinkan setiap paket menghasilkan sebanyak 11,65 ekor (12 ekor). Dengan perhitungan ini, diharapkan setiap peternak dapat secara rutin menjual 1 ekor domba setiap bulan. Pada saat pengkajian konsep Kampung Domba, nilai jual seekor domba berusia sekitar 8 bulan berkisar antara Rp 400.000 – Rp 500.000. Nilai jual domba sebesar itu menempatkan komposisi perolehan bulanan petani di kisaran 50% dari UMR Provinsi Banten.

Pengembangan ternak di lokasi Kampung Domba sampai saat ini berjalan baik, akan tetapi dalam perkembangan di masa depan harus memperhatikan dampak sosial-budaya dalam konteks sosial masyarakat Banten. Aspek sosial-budaya harus pula diintegrasikan secara baik karena Banten telah lama dikenal sebagai suatu wilayah keras dan dicirikan oleh sikap dan tindakan kekerasan yang disebut *budaya jawara*. Eksistensi, perilaku dan pengaruh budaya Banten sering menjadi sorotan dan kritik para pakar pembangunan karena lebih sering dipandang sebagai hambatan utama dalam upaya pengembangan wilayah. Guna memahami budaya Banten dan perannya dalam kehidupan sosial masyarakat Banten, perlu dikaji kondisi, posisi dan status tokoh-tokoh masyarakat dan lembaga kepemimpinan dalam lingkungan sosial masyarakat Banten. Keberhasilan program kampung ternak (domba dan kerbau) tersebut tidak terlepas dari peran kelompok, kepala desa, dan tokoh masyarakat yang merupakan panutan yang dihormati dan disegani masyarakat setempat.

## PERTIMBANGAN SOSIO-KULTUR

Hal yang terlupakan atau kurang diperhatikan dalam implementasi kebijakan pengembangan dan peningkatan produksi ternak dan implementasinya dalam pembentukan Kampung Domba adalah pertimbangan sosio-kultur Banten yang bersifat spesifik. Eksistensi, perilaku tokoh lokal tradisional dan pengaruh budaya Banten sering menjadi sorotan dan kritik para pakar pembangunan. Guna memahami budaya Banten dan perannya dalam kehidupan sosial masyarakat Banten yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pembangunan, perlu dikaji dan dipertimbangkan hal-hal berikut: (a) kultur dasar masyarakat Banten; (b) kepemimpinan (*leadership*); (c) keterlibatan tokoh lokal dalam politik lokal; dan (d) pola dan proses pengambilan keputusan, yang terkait dalam mendukung keberhasilan pengembangan peternakan secara umum.

### Pertimbangan kultur umum

Orang Banten terdiri atas berbagai subetnik yang berasal dari berbagai latar belakang. Etnis Sunda Banten menghuni wilayah selatan (Kabupaten Lebak dan Pandeglang), sedangkan wilayah utara (Kabupaten Tangerang) dihuni kelompok masyarakat keturunan pasukan dan buruh angkatan perang kerajaan Mataram yang menetap setelah kegagalan Mataram mengusir Belanda di Batavia pada abad ke-17. Disamping itu, dijumpai pula kelompok masyarakat yang mengaku orang Banten Asli berdasarkan keturunan yang telah menetap berabad-abad di wilayah Banten. Kelompok Banten Asli menganut agama Islam walaupun mereka masih mempercayai kekuatan supernatural. Dua bahasa lokal digunakan masyarakat Banten yakni bahasa Sunda digunakan oleh masyarakat wilayah selatan (Kabupaten Pandeglang) dan bahasa Jawa-Serang digunakan di Kabupaten Serang, Tangerang dan Cilegon (SURADISASTRA *et al.*, 2009). Bahasa Sunda tanpa hierarki digunakan di Kabupaten Lebak akibat pengaruh kuat orang Baduy yang hidup di lokasi-lokasi khusus di Kabupaten Lebak. Bahasa Sunda non-hierarki digunakan semata-mata sebagai alat komunikasi dan bukan sebagai alat untuk membedakan orang menurut strata sosial.

Kegiatan utama masyarakat Kabupaten Pandeglang adalah bertani. Padi ditanam di lahan sawah beririgasi teknis dan sawah beririgasi non-teknis. Petani juga menanam kopi, cengkeh, petai, pisang dan durian. Seluruh hasil tanaman keras dijual sebagai sumber pendapatan utama. Pengolahan lahan sawah merupakan event sosial dan dilaksanakan secara gotong royong dalam kelembagaan *royongan*. Dalam *royongan* pertanian, pengolahan lahan dilakukan oleh kaum pria. Upah berupa uang tunai jarang diberikan dalam

kegiatan *royongan*, namun sebagai imbalan mereka diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan panen dengan upah bawon. Bila diberikan upah uang tunai, umumnya ketua kelompok menyimpannya untuk keperluan kelompok atau kebutuhan desa seperti membangun mesjid atau bangunan komunal lainnya. Masyarakat Banten juga mengenal *royongan* yang tidak memberi imbalan uang tunai yang disebut *lilituran* (SURADISASTRA *et al.*, 2009). Kelembagaan *royongan* juga dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jembatan dan berbagai infrastruktur pelayanan publik. *Royongan* merupakan kewajiban tiap rumah tangga. Kepala rumah tangga yang tidak hadir dalam suatu kegiatan *royongan* akan dikenakan denda uang tunai sebagai pengganti atau kompensasi atas ketidakhadirannya.

Kultur umum masyarakat Banten tidak menjadi penghalang terhadap gagasan dan upaya pembangunan peternakan. Ekosistem Banten yang didominasi oleh lahan usahatani, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usahatani dan bentuk-bentuk kelembagaan komunal dan kegiatan kolektif lainnya merupakan salah satu aset yang dapat dimanfaatkan dalam upaya pengembangan peternakan. Secara kultural, ternak ruminansia telah menjadi bagian kehidupan masyarakat Banten. Masyarakat Banten yang sebagian besar beragama Islam sangat toleran dengan kehadiran ternak ruminansia khususnya kerbau dan ruminansia kecil yang merupakan hewan kurban yang dibutuhkan dalam hari Raya Idul Adha.

### Aspek kepemimpinan

Dalam setiap komunitas selalu terdapat tokoh penggerak yang ditampilkan dalam bentuk kelembagaan kepemimpinan (*leadership*). Orang Banten mengenal tiga bentuk kepemimpinan: (a) pemimpin formal atau *umaroh*; (b) pemimpin keagamaan atau *ulama*; dan (c) pemimpin budaya atau *jawara*. Seorang tokoh kepemimpinan (*leadership*) desa, baik ia seorang tokoh formal (aparatur pemerintah) maupun tokoh pemimpin informal (tokoh agama, budaya, pedagang sukses, dll.) disebut *kokolot* atau *olot*. Sebutan *olot* menunjukkan rasa hormat dan segan masyarakat terhadap seseorang karena pengetahuan, pengalaman dan kebijaksanaan (*wisdom*) yang dimilikinya. Lembaga kepemimpinan lain yang dijumpai dalam sistem sosial Banten antara lain adalah *carik*, *ulu-ulu*, *kabayan* dan *amil*, berturut maknanya adalah sekretaris desa, petugas urusan pengairan, juru penerang dan sekretaris keagamaan (SURADISASTRA *et al.*, 2009).

Jawara dan ulama merupakan subkultur dalam kultur besar Banten. Kedua subkultur tersebut saling membutuhkan dalam hubungan sosial integratif

kemasyarakatan. Sebagai tokoh masyarakat, seorang kiai atau ulama merupakan suatu instrumen penting untuk melegitimasi status dan posisi sosial seorang jawara. Sebaliknya, para kiai mengharapkan imbalan berupa perlindungan dan bantuan fisik lainnya dari masyarakat jawara. TIHAMI (2005) dan SURADISASTRA *et al.* (2009) mengamati bahwa eksistensi budaya jawara tidak terpisahkan dari budaya ulama. Dalam sebuah pesantren (*Islamic traditional boarding school*), seorang guru atau kiai tidak hanya mengajarkan ilmu keagamaan, namun seringkali juga mengajarkan ilmu bela diri tradisional. Pelajar yang mampu menguasai ilmu agama dengan baik disebut santri dan mereka diharapkan menyebarkan ilmu keagamaan kepada masyarakat luas setelah mereka menamatkan pendidikannya. Pelajar yang lebih menguasai ilmu bela diri dan keterampilan fisik lainnya disebut jawara. Para jawara lulusan pesantren umumnya mendirikan *paguron* atau sekolah ilmu bela diri dan pendidikan kekuatan supranatural. Tugas utama masyarakat paguron adalah menjaga para ulama dan para santri dari tindak kriminal yang tidak diharapkan. Jawara adalah penjaga pesantren tradisional. TIHAMI (2005) menambahkan bahwa "seorang jawara asli adalah pasukan para ulama". Seorang jawara yang mendalami ilmu keagamaan disebut *abuya* (ulama desa). Bila jawara terlibat dalam urusan politik lokal, ia disebut *jaro* (BOENCIS, 2003). Kata jawara mungkin berasal dari kata "juara" karena selalu diasosiasikan dengan keunggulan penguasaan ilmu bela diri tradisional (silat Banten). Subkultur jawara sering dikritik oleh berbagai pihak, terutama karena kesan yang dikaitkan dengan sifat keras dan kasar (*violence*) dan ketakutan komunal yang diciptakannya. Dari sudut pandang pendidikan, kesan yang dimunculkan tersebut berkaitan erat dengan pendidikan rendah yang diperolehnya.

Esensi filosofi seorang jawara adalah "berjihad untuk imbalan materi" (ABRORI, 1999). Untuk menjaga kelangsungan perolehan ekonomi, jawara berusaha keras untuk melegitimasi posisinya sebagai penguasa tradisional. Pendekatan SURADISASTRA *et al.* (2009) mengungkap bahwa kesan jawara sebagai seorang patriot telah berubah menjadi semakin mendekati *muscle for hire* sebagai alat untuk memobilisasi masyarakat di wilayah kekuasaannya. Jawara lebih suka disebut pendekar (*rural knight*) untuk menunjukkan posisinya sebagai bagian integral masyarakat. Para jawara dan ulama merupakan kunci utama dalam sistem kemasyarakatan Banten. Kedua subkultur ini merupakan *entry-point* untuk memperkenalkan suatu gagasan atau program pembangunan wilayah, termasuk pengembangan kampung ternak dengan melibatkan aktif dalam program tersebut sehingga mampu mempengaruhi perilaku masyarakat.

Kekuatan sosial kedua tokoh tradisional tersebut sangat menentukan perilaku sosial dan pola pikir masyarakat. Hampir setiap tindakan kolektif yang akan dilaksanakan selalu diinformasikan kepada kedua tokoh tersebut. Namun sebaliknya, tidak setiap seluruh kegiatan memperoleh perhatian yang sama dari kedua tokoh tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dinilai akan memberikan keuntungan finansial dan *social benefit* pada umumnya dengan cepat mendapat perhatian tokoh jawara lokal. Para jawara adalah individu-individu pragmatis. Mereka menjadi tokoh pimpinan masyarakat, pengusaha sukses, birokrat lokal yang berpengaruh dan beberapa diantaranya menjadi tokoh politik. Kebutuhan memobilisasi massa dalam kegiatan politik (pemilu, pilkada, dll.) lebih mudah mendapat perhatian tokoh jawara karena mampu memberikan imbalan finansial secara cepat. Akan tetapi kegiatan-kegiatan terkait sektor pertanian seperti pertemuan kelompok tani, pembinaan oleh dinas setempat umumnya kurang mendapat perhatian jawara setempat (SURADISASTRA *et al.*, 2009). Namun demikian bila kemudian terjadi perolehan finansial yang mencolok, dapat dipastikan perhatian jawara lokal akan tergugah. Di sisi lain para ulama umumnya merestui setiap kegiatan produktif yang dirancang dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Pihak pemerintah (*umaroh*) di Kabupaten Pandeglang umumnya melibatkan tokoh kiai dan jawara dalam kegiatan pembangunan wilayah dengan menempatkan tokoh-tokoh yang disegani dalam implementasi kebijakan pembangunan setempat. Peran ketokohan tersebut adalah sebagai motivator/penggerak dalam mempengaruhi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan/program yang dirancang di suatu wilayah, karena dipandang sebagai panutan dan disegani (dituakan).

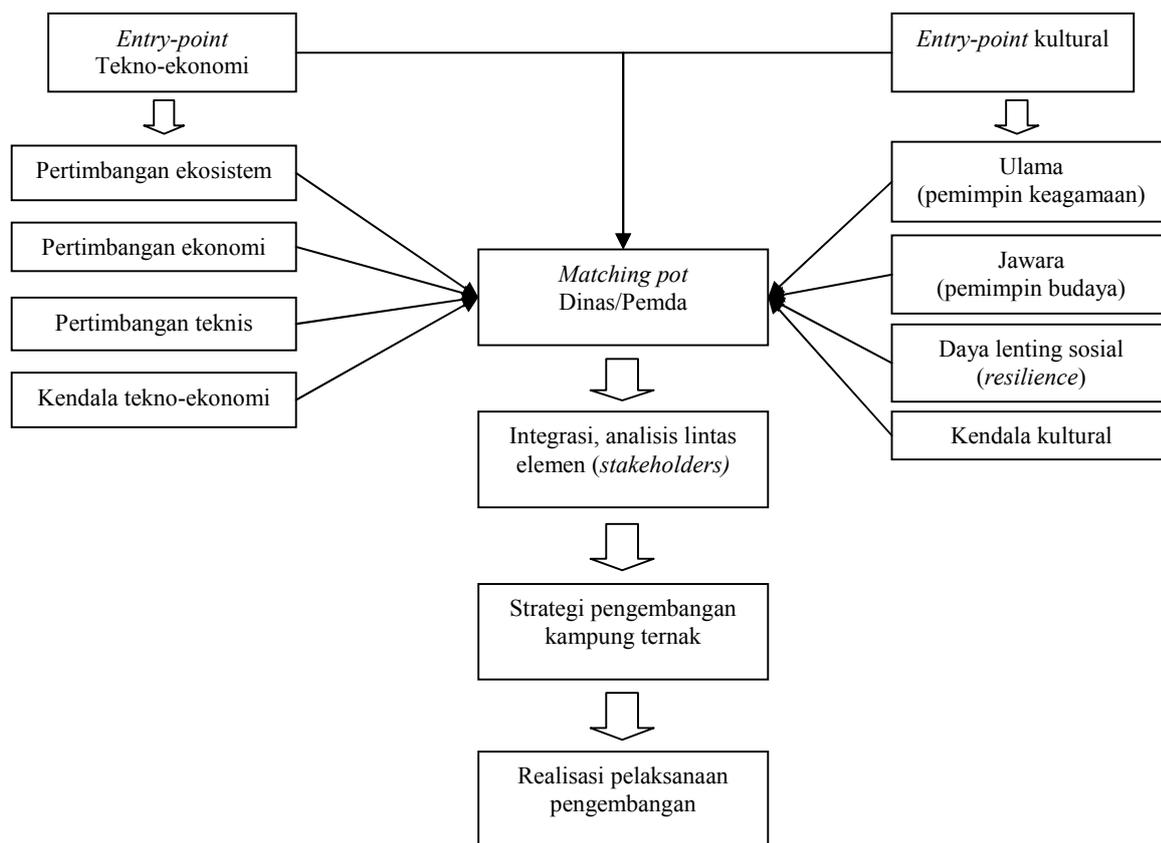
Kondisi di atas mengindikasikan bahwa setiap kegiatan kolektif masyarakat tidak pernah luput dari perhatian tokoh kepemimpinan lokal, baik pemimpin formal maupun informal. Keterlibatan tokoh informal dalam kasus Kampung Domba cukup berperan, terlihat dari kegiatan pengembangan ternak secara kolektif, walaupun belum menampakkan peningkatan kondisi finansial secara mencolok karena belum lama diterapkan. *Entry-point* dalam melibatkan tokoh keras seperti itu antara lain adalah dengan menempatkan kebanggaannya sebagai jawara yang layak mendapat perolehan dari posisinya dalam kegiatan tersebut, namun tanpa mengabaikan pertimbangan teknis program pengembangan ternak tersebut. Posisi yang layak secara teknis dan sosial antara lain adalah dengan menempatkan mereka sebagai salah satu peserta pendidikan teknis peternakan atau sebagai salah satu anggota kelompok peternak. Secara psikologis pengakuan ini akan menyentuh kebanggaannya sebagai individu berpendidikan formal rendah karena diikuti

sertakan dalam program pendidikan teknis peternakan. Kedepan dalam penerapan program kampung ternak peran tokoh tersebut agar menjadi perhatian dan dimanfaatkan sebagai motivator realisasi pengembangan peternakan secara umum di Provinsi Banten.

**Proses pengambilan keputusan**

Pemahaman masyarakat atas peran pimpinan sangat beragam. Tokoh pimpinan formal (umaroh) disegani karena kejelasan tugas dan tanggung jawabnya, sedang tokoh lokal disegani karena hal-hal lain yang bersifat normatif. Tokoh berpengetahuan disegani dan tokoh jawara ditakuti, namun keduanya mendapat tempat dalam sistem sosial masyarakat Banten. Akan tetapi masyarakat bersifat pasif dan skeptis dalam berbagai kegiatan program pembangunan yang dibiayai pemerintah. Mereka cenderung bersikap menerima apapun yang diberikan sebagai bantuan pemerintah. Pendekatan *top-down* lebih disukai karena

mereka tidak perlu berfikir lagi (SURADISASTRA *et al.*, 2009). Keputusan diambil oleh para pemimpin, baik pemimpin formal maupun pemimpin informal. Tokoh pemimpin (formal dan informal) memainkan peran penting dalam proses alih informasi kepada masyarakat. Dalam tatanan sosial masyarakat di Kabupaten Pandeglang, pengambilan keputusan dilakukan oleh kelompok penguasa, termasuk penguasa formal (umaroh) dan penguasa tradisional (kiai dan kaolotan, termasuk para jawara). Pemimpin lokal (olot) akan memanggil anggota masyarakat untuk memberi arahan pembangunan masyarakat setempat, menjelaskan pihak pemberi bantuan dan meminta agar masyarakat berpartisipasi. Di sisi lain para tokoh lokal mempertimbangan peluang untuk memperoleh keuntungan, baik berupa *financial profit* maupun *social benefit*. Kemampuan para tokoh lokal (para olot) dalam memahami suatu program pembangunan sangat menentukan kelangsungan program tersebut. Secara diagramatis, proses aliran informasi dan pengambilan keputusan disajikan dalam Gambar 1.



**Gambar 1.** Diagram alir proses integrasi kelembagaan lokal dengan gagasan kampung ternak

Gambar 1 menunjukkan aliran elemen-elemen tekno-sosial dan ekonomi ke dalam wadah kelembagaan dinas peternakan atau pemerintah daerah sebagai suatu *matching pot* dalam mengintegrasikan seluruh elemen-elemen *entry-point* yang dapat membantu perancangan dan implementasi kebijakan pelaksanaan kampung ternak. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah ketangguhan (*resilience*) sosial masyarakat terhadap intervensi gagasan dan program eksternal. Ketangguhan sosial dicirikan oleh kemampuan dan bentuk reaksi suatu sistem sosial terhadap intervensi atau perubahan eksternal. Ketangguhan sosial tinggi dicirikan oleh kemampuan sistem sosial untuk menyesuaikan diri dan berevolusi menjadi sistem sosial baru atau sistem yang diperbaharui. Gagasan atau intervensi eksternal diterima dan disesuaikan dengan karakteristik sosial internal, atau sebaliknya. Suatu sistem sosial yang memiliki ketangguhan rendah sangat mudah runtuh atau melemah dan bahkan mati. TOMPKINS dan ADGER (2004) mengungkapkan bahwa *social resilience* sangat tergantung pada modal sosial (*social capital*), kelembagaan, sumberdaya dan distribusinya dalam suatu sistem sosial. Peran Dinas sebagai penentu kebijakan hendaknya merangkul semua pihak termasuk tokoh informal tersebut sehingga dengan kesepahaman dari berbagai elemen, maka program pengembangan kampung ternak dapat terealisasi secara berkelanjutan.

Untuk kasus pengembangan Kampung Domba di Pandeglang, suksesnya pengembangan adalah keterlibatan lintas institusi, lintas elemen (*stakeholders*) meliputi Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan, Balitnak, BPTP Banten, LSM, Kepala Desa, dan faktor utamanya adalah tokoh informal (lokal) yang ada di lokasi pengembangan sebagai pelaku langsung di lapang. Keterpaduan lintas institusi dan lintas elemen tersebut terbentuk dalam himpunan Kelompok Kerja (POKJA) sehingga masing-masing elemen memiliki kepentingan dalam membangun Kampung Domba secara terpadu (KETAREN *et al.*, 2010). Masing-masing elemen tersebut mendapatkan dampak positif dari kegiatan tersebut diantaranya Dinas Peternakan akan memiliki program percontohan model pengembangan ternak (sebagai *pilot project*), Dinas Kehutanan mendapatkan dampak terhadap kelestarian hutan lindung (*bufferzone management*), Dinas Ketahanan Pangan mampu mengembangkan tanaman pangan melalui integrasi tanaman-ternak yang berkembang di lokasi sesuai kondisi agro-ekosistem. Peran tokoh lokal yang disegani dan dihormati oleh masyarakat diposisikan sebagai ketua kelompok ternak yang sangat berperan dalam memotivasi penerapan teknologi yang meliputi teknologi budidaya (*breeding, feeding* dan manajemen),

yang terkait pula dengan target profit usaha yang dirancang melalui peningkatan skala usaha ditingkat peternak.

Peran tokoh tersebut cukup berpengaruh terhadap kemajuan pengembangan usahaternak di wilayah yang mampu diangkat sebagai model di tingkat Kabupaten Pandeglang, dan bahkan Provinsi Banten sebagai ajang pemberdayaan masyarakat (*bottom up planning*). Sampai saat ini, peran tokoh tersebut sudah mampu berperan sebagai pengajar (*trainer*) yang dimanfaatkan oleh dinas terkait dalam pengembangan ternak domba di lokasi lain. Disamping itu, lokasi tersebut tekah dimanfaatkan sebagai ajang pembelajaran (magang) oleh peternak dari wilayah lain. *Matching pot* direalisasikan oleh Dinas Peternakan sebagai ujung tombak pengembangan kampung domba, dan Pemda Pandeglang sebagai penggerak model *Pilot Project* yang memfasilitasi pengembangan sarana dan infrastruktur (jalan usahatani), sehingga mampu sebagai penghubung pihak pemodal termasuk yang sudah berjalan adalah pihak pendanaan Bank Indonesia (BI). Pengembangan lintas institusi yang didukung oleh tokoh informal tersebut mampu menumbuhkan kembangkan model kampung ternak domba yang saat ini berkembang menjadi "kampung domba terpadu" yang terintegrasi dengan subsektor lain sesuai dengan potensi wilayah. Lokasi tersebut telah dikunjungi oleh Wakil Menteri Pertanian, tahun 2010, dan Ka Badan Litbang Pertanian pada bulan Mei tahun 2011 sekaligus dicanangkan sebagai "Laboratorium Lapang/LL" Badan Litbang Pertanian dengan melibatkan lingkup eselon II dalam mendukung realisasi kegiatan.

Dalam sistem sosial Banten, ketangguhan sosial masyarakat dan kelompok tokoh tradisional tidak sama. Ketangguhan sosial masyarakat Banten sangat berkaitan dengan sifat kepemimpinan tokoh yang disegani. Pendekatan *top-down* yang lebih diterima etnis Banten (SURADISASTRA *et al.*, 2009) mengindikasikan ketangguhan sosial yang rendah. Dalam hal ini komunitas petani cenderung menerima dan melaksanakan program eksternal yang diintroduksikan oleh tokoh dan lembaga kepemimpinan setempat. Sebaliknya, komunitas pemimpin tradisional (kiai dan jawara) memiliki ketangguhan sosial lebih tinggi karena posisi sosial dan kemampuannya mengontrol kehidupan sosial komunitas Banten.

Dalam kondisi ini, rancangan dan implementasi kebijakan pengembangan Kampung Domba harus disosialisasikan juga kepada kedua kelompok subkultur tersebut. Selanjutnya kedua subkultur tersebut memainkan peran sebagai penyaring informasi dan gagasan eksternal sebelum disosialisasikan secara meluas kepada masyarakat petani peternak setempat.

## KESIMPULAN

Kajian analisis peluang pemberdayaan posisi dan peran tokoh informal/tradisional dalam upaya pengembangan ternak di Provinsi Banten menghasilkan beberapa kesimpulan yang bersifat komprehensif, meliputi aspek-aspek teknis, ekonomi dan sosial sebagai berikut:

1. Faktor-faktor teknis dan teknologi memiliki keterkaitan erat dengan kondisi biofisik dan finansial masyarakat Banten. Terlaksananya gagasan kampung ternak dalam bentuk Kampung Domba menunjukkan keseimbangan proporsional peran dan posisi faktor teknis dan ekonomi yang sesuai dengan kondisi biofisik setempat.
2. Faktor sosial-budaya dan aspek sosiologis dalam kondisi budaya Banten memiliki peran signifikan dalam setiap upaya atau intervensi eksternal yang bertujuan mengubah kondisi sosial-ekonomi masyarakat ke tingkat yang lebih baik, termasuk dalam pembentukan program kampung ternak.
3. Untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani-peternak di lokasi pengembangan Kampung Domba diperlukan partisipasi tokoh sosial lokal yang dapat membantu memperlancar kelangsungan kegiatan pengembangan peternakan di lokasi tersebut.
4. Fungsi tokoh agama dan budaya dalam masyarakat Banten sebagai tenaga mobilisator massa dapat dimanfaatkan secara positif dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pembinaan terkait upaya pengembangan peternakan, khususnya kampung ternak domba yang sudah terealisasi di Banten.

## DAFTAR PUSTAKA

- ABRORI, A. 1999. Perilaku Politik Jawa Banten dalam Proses Politik di Banten. Thesis Master. University Indonesia. 117 hlm.
- BOENCIS. 2003. Studi Tentang Karisma Kiai dan Jawa. [www.silatindonesia.com](http://www.silatindonesia.com). (12 Desember 2009).
- CHAMBERS, R. 1993. Rapid Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory. IDS Discussion Paper 311. IDS, Brighton.
- CONWAY, G.R. 1986. Agroecosystem Analysis for Research and Development. Winrock International, Bangkok, Thailand.
- DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PANDEGLANG. 2009. Laporan Tahunan. Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pandeglang. Dinas Pertanian dan Peternakan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
- DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN. 2008. Laporan Tahunan, Bidang Peternakan Provinsi Banten. Dinas Pertanian dan Peternakan, Pemerintah Provinsi Banten.
- DOKUMEN RPJM PROVINSI BANTEN. 2007. Mid Term Plan of the Province of Banten. 2007 – 2012.
- DIWYANTO, K. dan E. HANDIWIRAWAN. 2004. Peran Litbang dalam mendukung usaha agribisnis pola integrasi tanaman-ternak. Pros. Sistem Integrasi Tanaman dan Ternak. Denpasar, 20 – 22 Juli 2004. Puslitbang Peternakan bekerjasama dengan BPTP Bali dan CASREN hlm. 63 – 80.
- DOKUMEN RPJM PROVINSI BANTEN. 2008. Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009 di Provinsi Banten. Bersama Menata Perubahan. Kerjasama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. November 2008.
- KETAREN, P., D. PRIYANTO, B. SETIADI, B. RISDIONO, W. PUASTUTI, ISBANDI, I-W. MATHIUS dan S. ISKANDAR. 2010. Juhut Kampung Domba dulu, kini, dan nanti. Makalah disampaikan pada Seminar Kegiatan Kelayakan Pengembangan Usahaternak Domba dan Pola Pembiayaannya di Kelurahan Juhut, Karangtanjung, Pandeglang, 8 Desember 2010.
- PEMDA PROV. BANTEN. 2009. Provinsi Banten dalam Angka. Pemerintah Daerah Provinsi Banten. <http://www.pajak.net/blog/2009/06/16/upah-minimum-regional-provinsi-kota-umru>. (30 Juni 2010)
- PRIYANTO, D., W. PUASTUTI, B.R. PRAWIRADIPUTRA dan B. SETIADI. 2009. Analisis Potensi Pengembangan Domba di Kelurahan Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (melalui pendekatan Participatory Rural Appraisal). Laporan Penelitian. Balai Penelitian Ternak, Ciawi, Bogor
- SUBANDRIYO, B. SETIADI, D. PRIYANTO, M. RANGKUTI, L.H. PRASETYO, P. SITORUS, T.D. SOEDJANA, A. MULYADI, A. SEMALI, W.K. SEJATI, D. YULISTIANI, O.S. BUTAR-BUTAR dan B. UTOMO. 1994. Penelitian Pengembangan Pemuliaan Domba Prolifik Di Pedesaan. Puslitbang Peternakan bekerjasama dengan Proyek Pembangunan Penelitian Pertanian Nasional, Bogor. 104 hlm.
- SURADISASTRA, K., HERLINA TARIGAN dan ERMA SURYANI. 2009. Indigenous Community Empowerment in Poverty Alleviation. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Food and Agricultural Organization-Regional Asia and Pacific Office.
- TOMPKINS, E.L. and W.N. ADGER. 2004. Does Adaptive Management of Natural Resources Enhance Resilience to Climate Change? Ecology and Society 9(2): 10 [online] URL: <http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss2/art10/> (2 Februari 2009).
- TIHAMI, M.A. 2005. Tasbih dan Golok. Biro Humas Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Banten.